DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andriansyah. (2015). A*dministrasi Pemerintahan Daerah Dalam Analisa*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.

Asmorojati, A. W. (2020). *Hukum Pemerintahan Daerah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Bingkai NKRI.* Yogyakarta: UAD Press.

Dewata, M. F. N., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fauzan, E. M. (2017). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press

Huda, N., (2021). *Negara Kesatuan Dalam Wacana Teoritis*. Yogyakarta: PT. Nusamedia.

Huda, N., (2019). *Hukum Pemerintahan Daerah* . Bandung: PT. Nusamedia

Juanda. (2021). *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD Dan Kepala Daerah*. Bandung: Alumni

Kusriyah, Sri (2019). *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Semarang: Unissula Press

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum.* Mataram-NTB: Mataram University Press.

MD, Mahfud. (2014). *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajakgrafindo Persada

Rahayu, A. S. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rauf, R. (2018). *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekosentrasi, Desentralisasi dan Tugas Pembantuan)*. Pekanbaru Riau: Nusamedia.

Sirajuddin., Ibrahim, A., Hadiyantina, S., & Haruni, C. W. (2016). *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press.

Sirajuddin & Winardi. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.

Sukardjo, A., (2014). *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perpektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Umam, A. K. (2021). *Kuasa Oligarki Atas Minerba Indonesia: Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Minerba.* Jakarta: Universitas Paramadina.

Zein, Y. A., Khairi, M & Philona, R. (2021). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Aceh: Syiah Kuala University Press.

Jurnal

Agustiwi, A. (2014). Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Di Indonesia. *Rechstaat: Junal Ilmu Hukum. Vol. 8. Nomor 1.*

Al Farisi, M. S. (2021). Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Ecosystem. Vol. 21. Nomor 1.*

Arianto, N. A. (2022). Konsep Desentralisasi, Dekosentrasi, dan Otonomi Daerah

Arinanda, Z. D. & Aminah. (2021). Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan dan Perizinan Dalam Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara. *Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 10. Nomor 1.*

Buton, D.H., & Narjilah, R. S. M. (2019). Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan Dan Peningkatan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Vol. 1. Nomor 2.*

Darongke, F. J. B., Rumimpunu, D., & Roeroe, S. (2022). Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia. *Lex Privatum. Vol. 10. Nomor 3.*

Dewi, R. I. (2016). Problematika Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Novum: Jurnal Hukum. Vol. 3. Nomor 1.*

Hido, K. (2022). Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pasca Berlakunya UU No 3 Tahun 2020. *LEX ADMINISTRATUM. Vol. 10. Nomor 4.*

Jamil, N. R. (2022). Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Serta Dampak Pada Otonomi Daerah. *Staatrecht: Jurnal hukum kenegaraan dan politik islam, vol. 2. Nomor 2.*

Luhukay, R. S. & Dewi R.K. (2020), Sentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rancangan Undang-Undang Mineral Dan Batubara. *Al-'adl, 13.*

Manurung, D. (2021). Implikasi Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014. *In Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan*.

Marwan, A. & Julianthy, E. M. (2018). Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 15. Nomor 2.*

Matitaputty, M. I. (2012). Desentralisasi dan Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia Problem dan Tantangan. *Sasi. Vol. 18. Nomor 1.*

Muin, F. (2014). Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah. *Fiat Justisia*. *Vol. 18. Nomor 1.*

Prabowo, L., & Rafli, M. T. (2020). Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Vol. 2. Nomor 2.*

Putri, N. D., & Wicaksono, D. A. (2016). Implikasi legislasi pengambilalihan kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah pusat. *Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 13. Nomor 1.*

Rahayu, D. P., & Faisal, F. (2021). Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. *Vol. 3. Nomor 3.*

Rauf, R. (2016). Pandangan Umum Terhadap Konsep Otonomi Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Tinjauan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah). *Jurnal SIASAT. Vol. 10. Nomor 1.*

Redi, A. & Marfungah, L. (2021). Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum. Vol. 4. Nomor 2.*

Sanduan, A. P. (2022). Resentralisasi Perizinan Berusaha Pertambangan Mineral Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. Vol. 5. Nomor 1.*

Simandjuntak, R. (2015). Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah. Vol. 7. Nomor 1.*

Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Bina Praja: Journal Of Home Affairs Governance. Vol. 7. Nomor 2.*

Suganda, D. (2016). Pancasila, Keragaman, dan Negara Kesatuan. *Al-ijtimai: International Journal of government and social science. Vol. 1. Nomor 2.*

Surkati, A. (2012). Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan Dan Peningkatan Kerjasama Antardaerah. *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan. Vol. 28. Nomor 1.*

Syahruddin, E. & Yofita, E. (2020). Politik Hukum Penguasaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia. *Volume 06. Nomor 01.*

Waris, I. (2012). Pergeseran Paradigma Sentralisasi ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal kebijakan public. Vol. 2. Nomor 2.*

Wulandari, R. P. & Fahrozi. H. (2021). Politik Hukum Pengalihan Izin Pertambangan Pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah. *Vol. 8. Nomor 1.*

Yanto, A., Salbilla, F. & Sitakar, R. C. (2023). Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah Di Bangka Belitung. *Jurnal Interpretasi Hukum. Vol. 4. Nomor 2.*

Skripsi

Andesi, S. (2019). *Sinkronisasi Pengaturan Kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Pmerintah Provinsi Dalam Perpektif Penyelenggaraan Otonomi Daerah.* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).

Fazria, Z. (2021). *Implikasi yuridis pasal 4 ayat 2 undang-undang nomor 3 tahun 2020 terhadap sentralisasi pengelolaan minerba daerah oleh pemerintah pusat.* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)

Fernades, W. B. (2019). *Implementasi Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tambang Emas Belimeu Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)* (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU).

Khairunnisa, N. H. (2018). *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemberian Izin Pertambangan BahanGalian Batuan danPenertiban Pertambangan Liar diKabupaten Gowa* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Lestari, S. E. (2014). *Problematika Kewenangan Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.*

Mukti, A. (2021). *Tinjauan Yuridis dan Siyasah Dusturiyah Atas Desentralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Kepada Pemerintah Provinsi* (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).

Tomboelu, V. E. (2020). *Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6535)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721)

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91)

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012 Perihal pengujian UU No. 4 Tahun 2009 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-1/2003 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Terkait Wewenang Penguasaan Oleh Negara, Mekanisme Persaingan Usaha dan Penetapan Harga BBM.